

OPTIMALISASI ALOKASI BELANJA MODAL DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Mohammad Fitra Aditya

NPP. 29.0819

Asdaf Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: fitraa008@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Capital expenditure is the allocation of funds from local governments in the regional budget to add fixed assets. The basis for the allocation of capital expenditure is the regional need for facilities and infrastructure, both public infrastructure facilities and for the smooth implementation of government. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and understand the optimization of capital expenditure allocation in improving regional infrastructure development in Grobogan Regency, inhibiting factors, and efforts made by the local government. **Method:** The research uses qualitative methods with an inductive descriptive approach. Data collection was carried out using interview and documentation techniques. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the allocation of capital expenditure in the regional government of Grobogan Regency is appropriate, but the realization of regional infrastructure development is still lacking, especially road construction. **Conclusion:** Optimization of capital expenditure allocation in increasing regional infrastructure development in Grobogan Regency, Central Java Province, still cannot be said to be optimal, because many indicators of the existing dimensions are not met properly. Inhibiting factors include insufficient financial capabilities, unsupportive natural conditions, namely expansive soil types, and the refocusing of the Budget for handling Covid-19, it is recommended that local governments should increase the scale of development priorities, of course, by projecting the budget, the need for coordination and synergy between the government and third parties in this case experts in their fields, both architects, engineers and contractors so that buildings can last a long time and reduce the risk of budget waste.

Keywords:: Optimization, Capital Expenditure, Infrastructure Development

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Belanja modal merupakan pengalokasian dana dari pemerintah daerah dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Dasar alokasi belanja modal yaitu kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik fasilitas infrastruktur publik dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan pemda. **Metode:**

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai, namun pada realisasi pembangunan infrastruktur daerah masih kurang khususnya pembangunan jalan. **Kesimpulan:** Optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, masih belum bisa dikatakan optimal, dikarenakan banyak indikator dari dimensi yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Faktor penghambat yang antara lain kemampuan keuangan masih kurang, keadaan alam yang tidak mendukung yaitu jenis tanah yang ekspansif, serta terjadinya *refocusing* anggaran penanganan *Covid-19*, maka disarankan pemerintah daerah harus meningkatkan skala prioritas pembangunan, tentunya dengan memproyeksikan anggaran, perlunya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan pihak ketiga dalam hal ini para ahli dibidangnya baik arsitek, insinyur maupun para kontraktor agar bangunan dapat bertahan lama dan mengurangi resiko pemborosan anggaran.

Kata kunci: Optimalisasi, Belanja Modal, Pembangunan Infrastruktur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu dari negara dengan kemajemukan yang tinggi, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun kondisi geografis yang dimiliki. Kondisi tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan pembangunan nasional melalui potensi segala sumber daya yang dimiliki, kondisi demografi yang dikelola dan diatur dengan konsisten akan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yang berbunyi "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...". Diantara tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang pada akhirnya menjadi landasan akan munculnya otonomi daerah.

Konsekuensi dari uraian paragraf diatas, maka pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan guna membiayai semua aspek kebutuhan daerah demi terwujudnya keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah dalam hal ini infrastruktur, pemerintah daerah melakukan penganggaran ke dalam belanja modal. Pengalokasian belanja modal tidak saja dirumuskan dalam negoisasi di pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif, namun juga melibatkan pihak ketiga dalam hal ini saran dari para insinyur, arsitek, dan perencana. Disamping itu juga, dalam pengalokasian belanja modal ini berhubungan sekali dengan perencanaan jangka panjang dalam perihal keuangan, karena belanja modal untuk membiayai pengadaan dan pemeliharaan aset tetap. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui manajemen keuangan daerah, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah menjadi salah satu kunci terpenting dalam mencapai tujuan penyelenggaraa pemerintahan yang salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini penyediaan infrastruktur daerah yang baik.

Kebutuhan akan infrastruktur yang sangat tinggi manjadi tantangan terberat sendiri dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Sedangkan dalam hal anggaran, pemerintah sangat terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Upaya yang telah dilakukan

oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan anggaran belanja modal untuk membangun infrastruktur, namun demikian anggaran APBN dinilai belum mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, untuk memfokuskan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Belanja modal merupakan pengalokasian dana dari pemerintah daerah dalam APBD untuk menambahkan aset tetap. Dasar alokasi belanja modal yaitu kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik fasilitas infrastruktur publik dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Halim (2014:107) dalam teorinya menyatakan bahwa: “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran guna perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode anggaran”. Belanja modal diperuntukan guna pembiayaan pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun guna mendukung pelaksanaan kegiatan di suatu pemerintahan yang nilainya relatif material, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lain yang digunakan untuk pengadaan aset belanja yang bersifat rutin dalam kegiatan pemerintah seperti biaya pemeliharaan aset dan belanja di bagian administrasi umum sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal ini pengalokasiannya didasarkan pada kebutuhan akan fasilitas infrastruktur daerah termasuk sarana prasarana umum, dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka desentralisasi. Belanja modal termasuk dalam bagian belanja daerah yaitu belanja langsung. Kemudian dalam pengalokasiannya anggaran belanja modal digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan pengadaan aset tetap di suatu daerah. Optimalisasi alokasi anggaran yang baik, dalam hal ini pengalokasian anggaran belanja modal sendiri akan mendorong peningkatan pembangunan, dan bermuara kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengalokasian belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten Grobogan telah sesuai, namun pada realisasi pembangunan infrastruktur daerah masih kurang khususnya pembangunan jalan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan di tahun 2020 yang didapatkan penulis bahwa, Kabupaten Grobogan memiliki panjang jalan keseluruhan mencapai 917,78 km, dengan presentase kondisi 42% dalam keadaan baik, 9% dalam kondisi sedang, 22% kondisi rusak dan 27% mengalami rusak berat, prioritas pembangunan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mengetahui infrastruktur mana yang sangat mendesak untuk diperbaiki.

Masalah lain yang muncul yaitu kemampuan keuangan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting bagi setiap pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tidak bisa teratasi dengan cepat dikarenakan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menjadi menghambat pembangunan daerah. Kabupaten Grobogan mempunyai kendala dalam hal kemampuan keuangan, hal ini tentunya berdampak juga pada terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah.

Masalah lain yang juga muncul adalah kondisi alam. Ada kondisi alam baik dan sangat mendukung, begitu pula sebaliknya dimana kondisi alam menjadi masalah sendiri bagi kehidupan manusia. Kabupaten Grobogan berada di daerah tanah yang ekspansif, terletak diantara 2 (dua) pegunungan

kapur, yaitu pegunungan kapur Kendeng Utara dan pegunungan kapur Kendeng Selatan. Hal demikian mengakibatkan tanah menjadi labil seiring dengan musim yang terjadi yang berakibat pada perubahan kadar air dalam tanah. Pergerakan tanah berdampak buruk pada konstruksi pembangunan disuatu daerah. Hal ini mengakibatkan bangunan dengan konstruksi yang tidak pas dapat cepat mengalami kerusakan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian dari Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya yang berjudul *Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik Di Pemerintah Daerah* (Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya, 2014). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif menemukan bahwa, efektifitas keuangan dan DAK berpengaruh positif dalam proporsi belanja modal. Sementara kemandirian dan DAU berpengaruh negatif tapi signifikan dengan proporsi belanja modal. Sedangkan efisiensi dan SiLPA tidak berpengaruh signifikan dalam proporsi belanja modal. Kemudian penelitian dari Alek Murtin yang berjudul *Optimalisasi Peran Analisa Standar Belanja Dalam Penyusunan Anggaran Belanja SKPD Di Kabupaten Lingga* (Alek Murtin, 2013). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif menemukan bahwa, diperlukan instrumen dokumen Analisa Standar Belanja selain SPM dan Standar Satuan Harga dalam optimalisasi penyusunan anggaran belanja SKPD. Penelitian selanjutnya dari Agus Wahyudin yang berjudul *Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa* (Agus Wahyudin, 2014). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif menemukan bahwa, Variabel PAD, DBH, dan luas wilayah daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara variabel DAU punya arah negative dan tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan luas wilayah daerah berpengaruh terhadap jumlah belanja modal. Penelitian berikutnya dari Agus Priambodo yang berjudul *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* (Agus Priambodo, 2017). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dan menemukan bahwa, PAD, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tumbuhnya perekonomian. Kemudian penelitian dari Andi Fitrawati Abdullah yang berjudul *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Mamampang Di Kabupaten Gowa* (Andi Fitrawati Abdullah, 2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa, Pembangunan tersebut sudah efisien, dengan memanfaatkan dana desa yang sesuai dengan rencana dan dana anggaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan berbagai penelitian sebelumnya terletak pada fokus dan lokasi penelitian, metode penelitian, dan hasil pembahasan. Penulis mengambil judul, “Optimalisasi Alokasi Belanja Modal dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan Teori Siringoringo (2005:5) yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu tujuan, keputusan, sumber daya.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Peneliti memakai pendekatan kualitatif supaya informasi dan data yang diperoleh alami dan kaya, serta peneliti dapat mengeksplor lebih dalam permasalahan yang akan diteliti. Creswell (2015:31) menyatakan bahwa: “Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengeksplor permasalahan lebih dalam dan menjawab isu yang tidak dapat diketahui variabel-variabelnya dalam penelitian”. Peneliti menggunakan pendekatan secara induktif karena penyajian data yang secara deskriptif terdiri dari pernyataan dan gambar. Menurut Nazir (2014:166) menyatakan bahwa: “Pendekatan induktif adalah cara berfikir menyusun suatu argumentasi yang bersifat umum yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang spesifik”. Pendekatan induktif menjelaskan bahwa suatu penelitian berpedoman dari data yang didapat dan dikaitkan pada teori yang sesuai, sehingga kesimpulan yang sifatnya umum dapat diketahui.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan informan yang akan diwawancarai sebagai sumber data primer dan dokumen-dokumen terkait sebagai data sekunder yang bersifat sebagai pendukung. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala BPPKAD, Kepala BAPPEDA, Sekretaris BAPPEDA, Kabid Administrasi Anggaran Keuangan BPPKAD, Kabid Perencanaan dan Pengendalian BAPPEDA. Peneliti memperoleh data sekunder tanpa perlu turun langsung di lapangan untuk mengambil data. Adapun jenis data sekunder yang digunakan berupa buku, surat kabar, dokumen-dokumen terkait, laporan anggaran dan realisasi APBD tahun anggaran 2018-2020 dan data infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan teori yang peneliti pakai dalam menganalisis optimalisasi masih belum bisa dikatakan optimal, dikarenakan banyak indikator dari dimensi yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Analisis Fokus Penelitian Dari Perspektif Teoritis

Konsep teori optimalisasi yang peneliti gunakan adalah konsep dari Siringoringo (2005) yang didalamnya mencakup 3 (tiga) dimensi. Berdasarkan 3 (tiga) dimensi tersebut yaitu yang pertama tujuan, keputusan dan sumber daya.

1. Tujuan

Tujuan merupakan segala sesuatu hal yang ingin dicapai dan juga merupakan suatu kunci dalam menentukan atau merumuskan suatu hal yang akan dilaksanakan, dan ketika pekerjaan itu harus dilaksanakan disertai pula dengan perencanaan yang baik, dengan koordinasi yang baik pula, tujuan daripada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan yaitu adalah menyelenggarakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang transparan,

terbuka, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan berdasar asas desentralisasi dari pusat ke daerah dan asas otonomi daerah, yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus memenuhi beberapa indikator-indikator yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

a. Maksimalisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hal yang penting bagi daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu perlunya upaya untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi sumber pendapatan daerah tersebut. Dalam memaksimalkannya ada beberapa langkah terobosan dalam kebijakan yang di ambil. Dalam PAD ada pajak daerah, dalam pemungutan pajak yang dulu *door to door* saat ini bisa *real time*, sehingga memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak, kemudian juga menggali potensi-potensi di daerah seperti tempat wisata, BUMD (badan usaha milik daerah) yang nantinya ada retribusi, juga ada dana transfer. Dana Transfer itu dana dari pusat itu yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil, dan setiap daerah itu pasti mendapat bagian dari Dana Transfer tersebut. Dana tersebut ditujukan untuk membiayai daerah dalam rangka otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 mengatur untuk Dana Transfer 25% nya untuk belanja infrastruktur daerah yang akhirnya masuk ke dalam belanja modal. Jadi ini juga salah satu upaya untuk memperluas penerimaan, dengan melakukan pengajuan tentang program daerah terlebih dahulu, dan pusat yang akan menentukan.

b. Meminimalisasi Pengeluaran Daerah

Minimalisasi pengeluaran merupakan salah satu prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari termasuk juga di lingkungan pemerintahan. Minimalisasi pengeluaran dilakukan untuk mengurangi terjadinya pemborosan anggaran, yang nantinya berdampak buruk terhadap kondisi keuangan. Pengeluaran anggaran untuk meminimalisasinya yang pertama dilakukan adalah memproyeksikan anggaran, ada anggaran berapa dan untuk satu tahun itu kebutuhan apa saja, selain itu juga melakukan penghematan apa saja yang sekiranya tidak mendesak dan darurat dikesampingkan terlebih dahulu. Selain itu agar menghindari pemborosan dalam pembelian aset membeli langsung yang *recommended* yang bagus agar barang tersebut dapat bertahan lama. Jadi tidak beli rusak beli lagi, itu akan memakan banyak anggaran.

c. Ketersediaan Infrastruktur Yang Baik Dan Memadai

Infrastruktur yang memadai berdampak pada biaya produksi dan transportasi murah, sehingga jumlah produksi dan keuntungan meningkat, pendapatan yang diperoleh masyarakat meningkat. Pembangunan infrastruktur berarti bicara segala bidang, baik itu infrastruktur perhubungan, disana ada jalan, jembatan, ada sarana perhubungan lainnya, kemudian infrastruktur kesehatan, itu ada rumah sakit, puskesmas, ada sampai puskesmas pembantu, kemudian bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan infrastruktur sekolahan, kewenangan kabupaten baik itu SD, SMP, ada infrastruktur perdagangan nanti ada pasar, ada infrastruktur pengairan, ada sungai, waduk, saluran irigasi, kemudian ada infrastruktur keciptaan karya, termasuk disana ada perumahan, pemukiman itu nanti berkaitan dengan sarana dan prasarana yang ada didalamnya.

Kabupaten Grobogan sendiri untuk infrastruktur di bidang pengairan tidak ada masalah yang signifikan. Karena di Grobogan memiliki waduk mencapai 8 (delapan), salah satu yang terbesar yaitu Waduk Kedung Ombo, kemudian ada Waduk Nglangon. Kemudian juga didukung dengan adanya bendungan, bendungan besar ada 4 (empat) diantaranya yang sering didengar Bendungan Sedadi dan Bendungan Klambu, terus ada juga embung, embung itu seperti waduk tapi kecil, itu terdapat di desa-

desa biasanya dan itu ada banyak mencapai 50 lebih, kemudian fasilitas umum seperti pembangunan taman, renovasi alun-alun, dalam sektor kesehatan kemarin membangun RSUD tipe D di 2 (dua) lokasi kecamatan yang berbeda. Jadi untuk infrastruktur fasilitas publik Grobogan masih terbilang cukup baik, hanya di jalan saja yang masih terdapat banyak sekali kekurangan yang perlu dibenahi dan diperbaiki kedepannya.

2. Keputusan

Keputusan diambil dan ditetapkan dengan penuh pertimbangan dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Semua tahap kegiatan organisasi dan manajemen organisasi diperlukan pembuatan keputusan. Misalnya, untuk pembuatan keputusan dalam tahap perencanaan diperlukan banyak kegiatan sepanjang proses perencanaan tersebut, beberapa indikator-indikator yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

a. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah pilihan dari kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai tujuan dari suatu pernyataan keputusan. Dari alternatif-alternatif yang ada, kemudian dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang ada didalamnya. Pertimbangan utamanya adalah mana yang besar dampak baiknya dan mana yang risikonya paling kecil. Dalam pembuatan keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pemilihan alternatif keputusan. Pengambilan keputusan pasti ada koordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) lain untuk merumuskan kebijakan atau program kerja yang akan dilaksanakan. Misal untuk anggaran di Dinas Pendidikan, pasti akan berkoordinasi dengan mereka tentunya terkait anggaran yang tersedia, begitu juga dengan OPD yang lain, BPPKAD yang mengelola anggaran daerah yang kemudian disalurkan ke masing-masing OPD, tentunya berkoordinasi dengan mereka, jadi tidak asal memutuskan anggaran.

Berdasarkan uraian dan penjelasan responden diatas dapat diketahui bahwa, pengambilan keputusan tidak boleh dilakukan oleh satu pihak namun harus ada koordinasi yang baik dengan pihak instansi lain. Ketika muncul suatu permasalahan maka diperlukan terobosan atau alternatif keputusan untuk mengambil langkah dalam penyelesaian masalah.

b. Prioritas Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

Prioritas merupakan suatu langkah untuk mendahulukan atau mengutamakan sesuatu hal kegiatan terlebih dahulu dibanding dengan hal kebutuhan lain. Grobogan salah satu infrastrukturnya yang kurang baik itu adalah perhubungan utamanya jalan dan jembatan. Maka di periode lima tahun kemarin memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, yang tentunya disesuaikan dengan visi dan misi dari RPJMDnya. Yang pertama infrastruktur jalan, kedua infrastruktur kesehatan, yang ketiga infrastruktur Pendidikan. Jalan sebagai salah satu komponen utama penggerak perekonomian daerah karena bagaimanapun aksesibilitas dan konektivitas daerah terhubung dengan jalan. Apalagi Kabupaten Grobogan merupakan daerah pertanian, dengan komoditas utamanya adalah PaJaLe (Padi, Jagung, Kedelai), sehingga harus mendukung mobilitas petani dengan akses jalan yang baik.

Prioritas pembangunan jalan yang rusak berat dan memiliki strategis potensi ekonomis yang tinggi, misal rusak berat tapi itu tidak ekonomis jarang dilewati orang maka nanti dulu, kita prioritaskan jalur yang strategis dan ekonomis dulu. Berikutnya kembali lagi ke kemampuan keuangan daerah.

3. Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan suatu ukuran potensi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, atau lembaga instansi tertentu. Dengan adanya sumber daya maka pemilikinya dapat mendayagunakannya untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai. Sumber daya tidak dapat dibatasi jenis dan jumlahnya,

setiap yang kita punya dan miliki adalah sumber daya untuk melangsungkan kehidupan. Untuk melihat sejauh mana sejauh mana sumber daya yang membatasi diperlukan beberapa indikator yang telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting bagi setiap pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tidak bisa teratasi dengan cepat dikarenakan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menjadi menghambat pembangunan daerah, walaupun masalah pasif, tapi masih berkaitan dengan penganggaran atau kemampuan keuangan yang terbatas. Kabupaten Grobogan mempunyai kendala dalam hal kemampuan keuangan, hal ini tentunya berdampak juga pada terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah.

b. Sumber Daya Manusia Yang Terbatas

Manusia merupakan aktor utama dalam kehidupan dalam hal ini jalannya pemerintahan oleh sebab itu harus memiliki sumber daya manusia yang bagus, pengelolaan keuangan tentu kita memilih orang yang berkompeten dibidangnya yang mengerti tentang pengelolaan keuangan, artinya SDM harus unggul, apalagi bekerja di sektor keuangan integritas dan kompetensi dituntut untuk para pegawai yang ada. Kabupaten Grobogan mengalami kekurangan sumber daya manusia khususnya secara kuantitatif, jumlah pegawai masih kurang dalam pemenuhan kuota setiap instansi yang ada di daerah.

c. Kondisi Alam Yang Tidak Mendukung

Kondisi alam merupakan anugerah dari Tuhan, kita sebagai manusia hanya bisa menerima dan menempati yang kita dapat. Ada kondisi alam baik dan sangat mendukung, begitu pula sebaliknya dimana kondisi alam menjadi masalah sendiri bagi kehidupan manusia.

Kabupaten Grobogan berada di daerah tanah yang ekspansif, terletak diantara 2 (dua) pegunungan kapur, yaitu pegunungan kapur Kendeng Utara dan pegunungan kapur Kendeng Selatan. Hal demikian mengakibatkan tanah menjadi labil seiring dengan musim yang terjadi yang berakibat pada perubahan kadar air dalam tanah. Pergerakan tanah berdampak buruk pada konstruksi pembangunan disuatu daerah. Hal ini mengakibatkan bangunan dengan konstruksi yang tidak pas dapat cepat mengalami kerusakan.

3.2. Analisis Fokus Penelitian Dari Perspektif Legalistik

Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Pada peraturan tersebut yang termuat dalam pasal 121 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Belanja Infrastruktur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN”.

Pemerintah mulai tahun 2017 telah mewajibkan tentang penggunaan anggaran belanja infrastruktur paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya digunakan untuk belanja pegawai saja tetapi juga lebih kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik, yaitu melalui pembangunan infrastruktur daerah. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 dalam pasal 11 ayat 15 dijelaskan bahwa, Dana Transfer Umum digunakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk

belanja infrastruktur. Berikut ini adalah data presentase belanja modal terhadap Dana Transfer Umum yang ada di Kabupaten Grobogan dalam periode 2018-2020.

Tabel 4.6
Presentase Alokasi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum
Di Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2020

Tahun	Dana Transfer Umum (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Presentase (%)
2018	1.132.323.832.742	465.515.639.194	41,11%
2019	1.169.368.792.000	469.517.595.658	40,15%
2020	1.105.759.549.693	360.053.127.579	32,56%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Grobogan, diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa presentase belanja modal terhadap dana transfer umum pada tahun 2018 sebesar 41,11%, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 40,15%, dan di 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi 32,56%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, presentase belanja modal terhadap dana transfer umum dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2018-2020 selalu mengalami penurunan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan juga bahwa, capaian presentase belanja modal terhadap dana transfer umum dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2018-2020 selalu berada diatas 25%, artinya telah memenuhi standard minimal, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018 yang mengintruksikan alokasi anggaran minimal 25% dari Dana Transfer Umum untuk belanja modal.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Alokasi belanja modal sangat penting bagi pembangunan infrastruktur daerah. Konsep teori optimalisasi yang peneliti gunakan adalah konsep dari Siringoringo (2005) yang didalamnya mencakup 3 (tiga) dimensi. Berdasarkan 3 (tiga) dimensi tersebut yaitu yang pertama tujuan, keputusan dan sumber daya, maka berdasarkan teori yang peneliti pakai dalam menganalisis optimalisasi masih belum bisa dikatakan optimal, dikarenakan banyak indikator dari dimensi yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Diketahui bahwa presentase belanja modal terhadap dana transfer umum Kabupaten Grobogan pada tahun 2018 sebesar 41,11%, di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 40,15%, dan di 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup banyak menjadi 32,56%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, presentase belanja modal terhadap dana transfer umum dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2018-2020 selalu mengalami penurunan. capaian presentase belanja modal terhadap dana transfer umum dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2018-2020 selalu berada diatas 25%, artinya telah memenuhi standard minimal, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN Tahun 2018 yang mengintruksikan alokasi anggaran minimal 25% dari Dana Transfer Umum untuk belanja modal. Sebagaimana temuan Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya bahwa Dana Transfer berpengaruh terhadap proporsi alokasi belanja modal (Lufki Laila Nurhidayati dan Rizal Yaya, 2014).

Sumber pendapatan daerah terdiri dari sumber-sumber keuangan, sebagai berikut, Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Pendapatan daerah lain yang sah. Belanja modal untuk mengoptimalkan

tentunya dilihat dulu dari penerimaan daerah, disana ada PAD, Dana Perimbangan, DBH, DAU, DAK, kemudian ada Pendapatan daerah lain yang sah. Jadi yang menjadi fokus perhatian adalah sumber pendapatan daerah dulu. Upaya untuk memperluas jangkauan, baik dari pajak, retribusi, kemudian kita menggali potensi lain di daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan tersebut. karena apabila pendapatan kita banyak tentu anggaran yang digelontorkan untuk belanja modal ini juga besar, hal serupa ditemukan oleh Agus Wahyudin bahwa, Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan luas wilayah daerah berpengaruh terhadap jumlah belanja modal (Agus Wahyudin, 2014). Kebutuhan akan infrastruktur yang sangat tinggi menjadi tantangan terberat sendiri dalam pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Sedangkan dalam hal anggaran, pemerintah sangat terbatas dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan anggaran belanja modal untuk membangun infrastruktur, namun demikian anggaran APBN dinilai belum mencukupi untuk pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat menganggarkan APBD-nya untuk belanja modal, untuk memfokuskan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Kabupaten Grobogan sendiri untuk infrastruktur di bidang pengairan tidak ada masalah yang signifikan. Karena di Grobogan memiliki waduk mencapai 8 (delapan), salah satu yang terbesar yaitu Waduk Kedung Ombo, kemudian ada Waduk Nglangon. Kemudian juga didukung dengan adanya bendungan, bendungan besar ada 4 (empat) diantaranya yang sering didengar Bendungan Sedadi dan Bendungan Klambu, terus ada juga embung, embung itu seperti waduk tapi kecil, itu terdapat di desa-desa biasanya dan itu ada banyak mencapai 50 lebih, kemudian fasilitas umum seperti pembangunan taman, renovasi alun-alun, dalam sektor kesehatan kemarin membangun RSUD tipe D di 2 (dua) lokasi kecamatan yang berbeda. Capaian pembangunan ini tentunya berasal dari pengalokasian belanja modal, Sejalan dengan temuan Agus Priambodo bahwa, belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembangunan infrastruktur (Agus Priambodo, 2017).

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan dalam penelitian di BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Grobogan yakni besarnya pinjaman daerah, kondisi tanah yang ekspansif, panjangnya kondisi jalan yang rusak.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, masih belum bisa dikatakan optimal, dikarenakan banyak indikator dari dimensi yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Faktor penghambat yang antara lain kemampuan keuangan masih kurang, keadaan alam alam yang tidak mendukung yaitu jenis tanah yang ekspansif, serta terjadinya *refocusing* anggaran penanganan *Covid-19*, maka disarankan pemerintah daerah harus meningkatkan skala prioritas pembangunan, tentunya dengan memproyeksikan anggaran, pemerintah harus mengupayakan lebih keras lagi, agar perbaikan jalan rusak dapat segera diatasi dengan cepat dan tepat, perlunya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dengan pihak ketiga dalam hal ini para ahli dibidangnya baik arsitek, insinyur maupun para kontraktor agar bangunan dapat bertahan lama dan mengurangi resiko pemborosan anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan kemampuan penulis, keterbatasan waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu pemerintah daerah sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan Teori Siringoringo (2005:5).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah di tanah ekspansif di Kabupaten Grobogan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPPKAD dan Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aminah S, Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Rawamangun: Kencana.
- Cresswell, J. W. 2013. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Terj. Angkatan III dan IV KIK-UI bekerja sama dengan Nur Khabibah). Jakarta: KIK Press.
- _____. 2015. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erlina, Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Fokusmedia.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riyadi dan Dedy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang. P.2005. *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simangunsong, F. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar, Dr. Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siringoringo. Hotniar. 2005. *Seri Teknik Riset Operasional ; Pemrograman Linear* : Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

<https://grobogan.go.id>

<https://bppkad.grobogan.go.id/>

<https://bappeda.grobogan.go.id/>

<https://jateng.bps.go.id/>

<https://grobogankab.bps.go.id/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-011830462/bupati-grobogan-terpilih-dilantik-perbaikan-jalan-rusak-jadi-pesan-ganjar-pranowo>

